
DESIGNING PUBLIC POLICY: A STRATEGIC APPROACH TO REALIZING EFFECTIVE AND RESPONSIVE GOVERNMENT MENDESAIN KEBIJAKAN PUBLIK: PENDEKATAN STRATEGIS DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN RESPONSIF

Sunni Chotijah Balqis¹, Thabita Clarista Rahmania Oktaf², Teza Putri Indahsari³, Lutfiatul Masruroh⁴, Ria Angin⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Jember – Indonesia

Corresponding author: sunnichotijah24@gmail.com

Article Information: submission received XXX; revision: XXX; accepted XXX; first published online XXX

Abstrak

As an essential component of efficient and inclusive governance, this research attempts to offer conceptual and practical knowledge about the public policy-making process. This paper examines the important phases in the policy design process, including problem identification, policy formulation, implementation, and evaluation, using a descriptive qualitative approach based on a literature review. This paper also discusses the importance of using data and evidence-based analysis to create fair and effective policies, as well as the role of key players in the policy-making process. The findings of the study show that the initial design of public policies that are mature, participatory, evidence-based, and in accordance with the socio-political conditions of the community greatly influence its success. Therefore, public policy-making is a strategic process that shapes the legitimacy and effectiveness of policies, not just an administrative process.

Keywords: effectiveness, actors, implementation, analysis, and design of public policies

I. PENDAHULUAN

Kebijakan publik menjadi semakin penting dalam mengatasi berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara dalam menghadapi dinamika global yang semakin rumit. Negara harus mengambil langkah-langkah proaktif yang tidak hanya reaktif, tetapi juga dipikirkan dengan matang dan visioner dalam menanggapi fenomena seperti meningkatnya kesenjangan sosial-ekonomi, urbanisasi yang tidak terkendali, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi. Dalam hal ini, desain kebijakan publik memainkan peran penting sebagai alat yang digunakan negara untuk memandu transformasi masyarakat dan membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan efisien.

Namun, membuat kebijakan publik yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat dengan cara yang adil dan berkelanjutan bukanlah hal yang mudah. Pemahaman yang mendalam mengenai keprihatinan publik, dinamika aktor, dan kemampuan kelembagaan diperlukan untuk prosedur politik, administratif, dan teknis yang membentuk proses pembuatan kebijakan. Desain yang tidak akurat dapat menyebabkan kebijakan yang bias atau tidak tepat sasaran, yang dapat membahayakan tujuan pembangunan yang telah diantisipasi. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh seberapa akurat kebijakan tersebut dirancang sejak awal, bukan hanya oleh besarnya anggaran atau niat baik pembuatnya.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan desain kebijakan publik sebagai elemen strategis pembangunan nasional yang demokratis dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya sebagai masalah teknis. Pentingnya studi ini didukung oleh pemahaman tentang bagaimana negara dapat menciptakan kebijakan yang sesuai dengan tuntutan publik dan juga kuat secara hukum.

Sebab itu, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan rangkuman sistematis mengenai proses-proses - mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan - yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan publik yang efektif dan sukses. Artikel ini juga menekankan pentingnya data dan analisis berbasis bukti dalam pengambilan keputusan dan bagaimana peran para pelaku kebijakan - baik dari sektor swasta, pemerintah, birokrasi, maupun masyarakat sipil - mempengaruhi bagaimana kebijakan dirancang dan dilaksanakan pada akhirnya. Dengan menggunakan sejumlah tinjauan literatur terkait, makalah ini diakhiri dengan telaah kritis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan rancangan kebijakan publik.

II. KAJIAN PUSTAKA

Analisis kebijakan publik merupakan suatu pendekatan sistematis dalam memahami serta meningkatkan kualitas kebijakan melalui metode yang logis dan terstruktur. Dunn (2003) menyatakan bahwa analisis kebijakan publik bertujuan untuk mengidentifikasi masalah secara tepat, merancang solusi yang sesuai, serta mengevaluasi hasil implementasi kebijakan. Dalam kerangka ini, desain kebijakan menjadi komponen kunci dalam menilai efektivitas intervensi publik.

Salah satu pendekatan konseptual yang banyak digunakan dalam kajian kebijakan publik adalah model siklus kebijakan yang dikembangkan oleh Howlett dan Ramesh (2003). Model ini membagi proses kebijakan menjadi enam fase, yaitu identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, legitimasi, implementasi, dan penilaian. Mereka menekankan bahwa siklus ini bersifat dinamis dan harus dipahami dalam konteks interaksi antara lembaga dan aktor dalam sistem politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Nugroho (2017), yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan, bukan semata-mata produk dari proses teknis.

Pendekatan yang lebih aplikatif dalam analisis kebijakan ditawarkan oleh Bardach (2009) melalui buku *The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. Ia mengusulkan delapan langkah strategis dalam menganalisis kebijakan yang mencakup deskripsi masalah secara akurat, pengembangan alternatif solusi, serta penggunaan analisis berbasis bukti untuk memproyeksikan dampak kebijakan. Pendekatan ini menekankan pentingnya ketelitian dalam memahami masalah serta kehati-hatian dalam merancang intervensi kebijakan yang efektif.

Seiring dengan berkembangnya pendekatan kebijakan kontemporer, muncul gagasan mengenai pentingnya kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Pramusinto dan Wicaksono (2021) menegaskan bahwa pemanfaatan data empiris dalam proses perumusan kebijakan daerah dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan. Namun, mereka juga mencatat bahwa lemahnya kapasitas kelembagaan serta keterbatasan dalam ketersediaan data menjadi tantangan utama dalam penerapan pendekatan ini di Indonesia.

Selain aspek teknis, legitimasi sosial juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Yani dan Siregar (2021) menyoroti bahwa kebijakan yang telah dirancang dengan baik sekalipun dapat mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya apabila tidak memperoleh dukungan sosial yang memadai dari masyarakat. Oleh karena itu, penerimaan publik menjadi elemen strategis dalam proses kebijakan.

Akhirnya, aspek evaluasi kebijakan juga sering kali menjadi bagian yang terabaikan. Bappenas (2022) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil rencana strategis nasional yang memiliki kerangka kerja evaluasi yang terintegrasi. Padahal, evaluasi merupakan elemen penting dalam membentuk siklus kebijakan yang adaptif terhadap perubahan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Howlett dan Ramesh (2003), yang menekankan bahwa kebijakan publik harus terus dievaluasi agar tetap relevan dan efektif dalam menjawab dinamika yang terjadi di masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

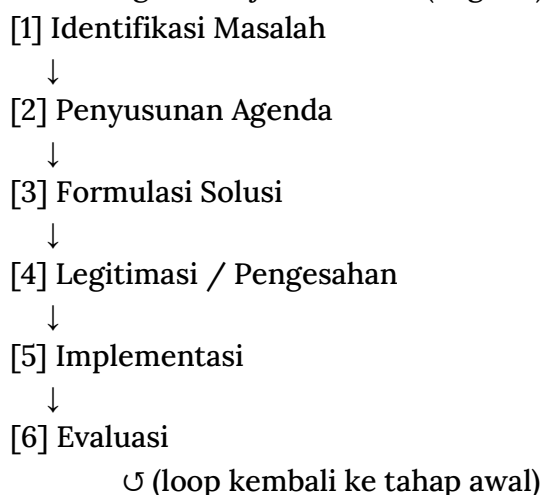
Dasar utama dari proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Metode ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menganalisis dan memahami kerumitan perencanaan kebijakan publik secara teoritis dan praktis. Melalui studi literatur, para peneliti dapat menyelidiki berbagai konsep, hipotesis, dan penemuan empiris sebelumnya yang telah disebarluaskan melalui publikasi ilmiah yang dapat dipercaya. Laporan resmi dari lembaga-lembaga pemerintah, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas isu-isu yang berkaitan dengan desain dan implementasi kebijakan, buku-buku akademis yang berkonsentrasi pada kebijakan publik, dan temuan-temuan penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan fokus penelitian ini dari beberapa sumber menjadi akar data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

Langkah-langkah penting dalam proses perancangan kebijakan, dinamika peran para aktor kebijakan yang terlibat, pendekatan analisis yang berbeda yang digunakan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan, serta faktor-faktor kontekstual seperti kondisi sosial-politik, struktur kelembagaan, dan budaya birokrasi yang memengaruhi efektivitas kebijakan merupakan beberapa tema utama yang diidentifikasi dan dikategorikan dalam literatur. Penelitian ini menekankan pada pemahaman yang mendalam melalui interpretasi kritis terhadap setiap referensi yang dikaji, selain mengandalkan pencatatan informasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber literatur, yaitu membandingkan data dari berbagai literatur yang membahas tema yang sama dan memetakan argumen konseptual yang saling mendukung satu sama lain dan memberikan kejelasan pada konstruksi analisis yang dibangun, sehingga dapat meningkatkan validitas data dan mencegah terjadinya bias penafsiran. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, mendalam, dan relevan untuk memahami taktik perancangan kebijakan publik di era modern.

IV. TEMUAN

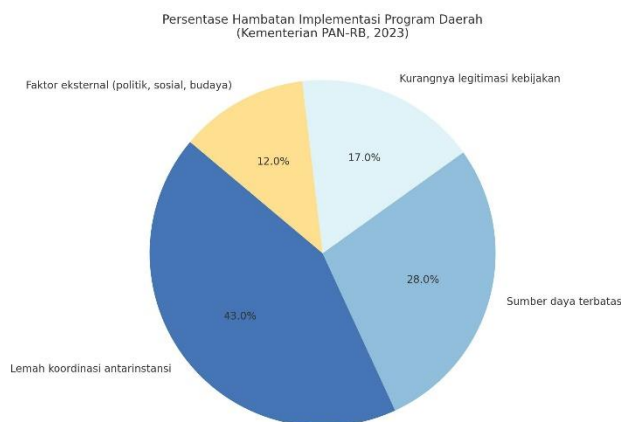
Temuan kajian literatur menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai langkah-langkah mendasar dalam proses pembuatan kebijakan selalu menjadi dasar bagi rancangan kebijakan publik yang efektif dan fleksibel. Proses perancangan kebijakan publik sering dibagi menjadi enam tahap: (1) identifikasi masalah; (2) penyusunan agenda kebijakan; (3) perumusan solusi alternatif; (4) pengesahan atau legitimasi kebijakan; (5) eksekusi; dan (6) evaluasi. Keenam fase tersebut bersifat siklus, yang berarti bahwa setelah implementasi atau evaluasi, prosesnya terus berlanjut, dan temuan evaluasi dapat sekali lagi menjadi titik awal untuk pembuatan kebijakan baru. Dinamika adaptif dari lembaga-lembaga pemerintah kontemporer, yang selalu berinteraksi dengan transformasi sosial, ekonomi, teknologi, dan politik yang cepat, tercermin dalam proses ini.

Siklus Perancangan Kebijakan Publik (Bagan 1)



Seluruh proses perancangan kebijakan didasarkan pada langkah identifikasi masalah. Pemerintah harus dapat membedakan antara gejala dan penyebab utama dari suatu masalah pada tahap ini. Menurut Dunn (2003), definisi masalah yang tidak tepat secara konseptual akan menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan dapat memperburuk keadaan yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, ketika membuat strategi untuk mengurangi kemiskinan, perlu untuk melihat lebih dari sekadar pendapatan rumah tangga yang rendah untuk mengatasi masalah struktural seperti distribusi aset, akses pendidikan, dan pengangguran terselubung.

1: Proporsi hambatan terhadap implementasi program daerah



Proses menentukan apakah suatu masalah cukup signifikan dan mendesak untuk dimasukkan ke dalam prioritas kebijakan pemerintah dikenal sebagai penyusunan agenda, dan ini merupakan tahap berikutnya. Pada tahap ini, opini publik, tekanan media, dan kekuatan politik menjadi pertimbangan penting (Ariel & Islam, 2024). Menurut penelitian Winarno (2012), isu-isu yang diliput oleh media memiliki kemungkinan 47% lebih besar untuk masuk ke dalam agenda kebijakan nasional.

Proses mengumpulkan, mengevaluasi, dan membandingkan beberapa pilihan kebijakan dikenal sebagai “perumusan solusi alternatif”. Metode-metode termasuk pemodelan skenario, analisis biaya-manfaat, dan analisis multi-kriteria digunakan dalam prosedur ini. Keterlibatan pemangku kepentingan juga penting dalam tahap ini untuk menjamin bahwa kebijakan yang dibuat mewakili tujuan masyarakat. Hanya sekitar 38% kebijakan daerah yang menyertakan masukan publik yang signifikan dalam proses penyusunannya, menurut survei LIPI tahun 2021.

Tahap pengesahan atau legitimasi formal dari kebijakan yang telah disusun dikenal dengan sebutan pengesahan kebijakan. Tergantung pada yurisdiksi kebijakan, proses ini

biasanya melibatkan lembaga legislatif, eksekutif, atau lembaga lainnya. Untuk menjamin keabsahan dan adopsi kebijakan, komponen legitimasi ini sangat penting.

Hambatan terbesar selama fase implementasi seringkali adalah kenyataan. Koordinasi antar lembaga, kemampuan kelembagaan, alokasi keuangan dan sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan yang berkesinambungan, semuanya memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut data dari Kementerian PAN-RB (2023), 43% program pemerintah daerah di Indonesia mengalami kendala dalam pelaksanaannya, dan sekitar 28% mengalami penundaan akibat koordinasi sektoral yang buruk, perebutan kekuasaan, dan kapasitas pelaksana yang tidak memadai. Hal ini menunjukkan bagaimana kualitas desain kebijakan sebelumnya memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan implementasi.

Langkah terakhir, evaluasi kebijakan, sangat penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang akan datang, selain bertindak sebagai alat pemantauan dan akuntabilitas. Evaluasi memungkinkan pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan tersebut masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan seberapa baik tujuan kebijakan tersebut telah tercapai. Howlett dan Ramesh (2003) menyatakan bahwa siklus kebijakan yang berkelanjutan secara signifikan diperkuat oleh tinjauan kebijakan yang reflektif dan partisipatif. Sayangnya, hanya sekitar 32% inisiatif strategis nasional yang memiliki sistem evaluasi kinerja yang menyeluruh dan terintegrasi, mengutip laporan Bappenas (2022).

Temuan studi ini mendukung gagasan bahwa perumusan kebijakan publik merupakan proses strategis yang membutuhkan analisis beragam aspek dan adaptasi yang berkelanjutan, bukan sekadar menyusun program kerja. Interaksi antar aktor, kerangka kerja kelembagaan, dan lingkungan sosial-politik yang lebih luas harus dipertimbangkan di setiap tingkatan. Kebijakan publik tidak dapat menjadi alat transformatif bagi pembangunan nasional kecuali jika didekati dengan perencanaan dan inklusivitas.

V. PEMBAHASAN

Beberapa asumsi dasar menjadi landasan pendekatan studi ini dalam mengkaji perumusan kebijakan publik. Pertama, diyakini bahwa berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda namun saling terkait-dari aktor pemerintah dan masyarakat sipil hingga media dan sektor korporasi-terlibat dalam proses deliberatif untuk menentukan kebijakan publik. Kedua, proses perancangan kebijakan idealnya bersifat reflektif dan siklikal, dengan setiap kebijakan didasarkan pada diagnosis masalah yang menyeluruh dan penilaian yang berkelanjutan. Ketiga, kualitas dan legitimasi kebijakan yang dikembangkan dianggap dapat ditingkatkan melalui pelibatan pemangku kepentingan dan penerapan data dan bukti empiris. Keempat, studi ini juga membuat asumsi bahwa kapasitas kelembagaan dan kerja sama antarlembaga, bukan hanya kejelasan teks kebijakan, memainkan peran penting dalam seberapa baik kebijakan diimplementasikan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika para pelaku, struktur kelembagaan, dan kerangka sosial politik yang muncul di masyarakat pada dasarnya tidak

dapat dipisahkan dari proses perancangan kebijakan publik. Sistem kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan dibentuk oleh fondasi fundamental dari enam tahap siklus perancangan kebijakan: identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan solusi, legitimasi, implementasi, dan penilaian.

Karena kebijakan yang dihasilkan kemungkinan besar hanya bersifat simbolis atau bahkan kontraproduktif jika akar masalahnya tidak diidentifikasi dengan tepat, maka tahap identifikasi masalah menjadi sangat penting dalam keseluruhan proses. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa penelitian empiris dan temuan audit pemerintah, kegagalan proyek-proyek pengentasan kemiskinan sebagai akibat dari data dan metodologi yang salah sasaran adalah contoh umum yang sering terjadi dalam konteks kebijakan sosial di Indonesia.

Penetapan agenda kebijakan juga tidak sepenuhnya bebas nilai karena sangat dipengaruhi oleh opini publik, tekanan politik, dan liputan media. Pengaruh komunikasi politik terhadap prioritas kebijakan negara ditunjukkan oleh fakta bahwa topik yang mendapatkan perhatian media 47% lebih mungkin untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan nasional (Winarno, 2012).

Selain itu, dalam merumuskan kebijakan, pendekatan partisipatif yang memungkinkan komunikasi dengan kelompok-kelompok yang terkena dampak harus dikontraskan dengan pendekatan teknokratis seperti analisis biaya-manfaat dan analisis multi-kriteria. Sayangnya, hanya sekitar 38% kebijakan daerah yang memuat masukan publik secara signifikan, menurut data LIPI (2021), yang mengindikasikan bahwa proses pembangunan masih banyak dikendalikan oleh logika birokrasi dan tidak sepenuhnya inklusif.

Menurut data Kementerian PAN-RB (2023), terdapat kendala yang signifikan di lapangan pada tahap implementasi kebijakan. Sebanyak 43% proyek pemerintah daerah mengalami hambatan implementasi yang besar, dan 28% lainnya mengalami penundaan produksi sebagai akibat dari koordinasi sektoral yang tidak memadai, perebutan kekuasaan, dan kekurangan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bagaimana proposal kebijakan yang mengabaikan faktor implementasi praktis sering kali tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Terakhir, evaluasi kebijakan masih menjadi langkah yang kurang diperhatikan. Refleksi kebijakan belum menjadi praktik standar dalam tata kelola pemerintahan, sebagaimana dibuktikan oleh temuan Bappenas (2022) bahwa hanya 32% program strategis nasional yang memiliki kerangka evaluasi yang terintegrasi dan menyeluruh. Evaluasi partisipatif dan berbasis data sebenarnya sangat penting untuk menentukan seberapa baik kebijakan bekerja, seberapa efisien kebijakan tersebut, dan seberapa relevan kebijakan tersebut dengan tuntutan publik yang terus berkembang.

Oleh karena itu, diskusi ini menyoroti bahwa merancang kebijakan publik membutuhkan strategi komprehensif yang mempertimbangkan faktor sosial, politik, dan

ekonomi, serta masukan dari masyarakat yang signifikan di setiap tingkat proses pembuatan kebijakan. Hal ini tidak dapat dilakukan secara sektoral dan teknis semata.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan ulasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perancangan kebijakan publik merupakan proses yang strategis, rumit, dan krusial bagi efektivitas intervensi pemerintah. Diperlukan sistematika, berbasis bukti, dan pelibatan publik dalam enam tahap yang meliputi identifikasi masalah, penyusunan agenda, desain solusi, pengesahan, implementasi, dan evaluasi. Efektivitas dan efisiensi kebijakan secara keseluruhan akan terkena dampak langsung jika salah satu dari tahap-tahap tersebut tidak berhasil, terutama identifikasi masalah dan implementasi.

Desain kebijakan yang baik harus dapat menjembatani kesenjangan antara hasil normatif yang diinginkan pemerintah dan realitas sosial. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik harus meningkatkan budaya peninjauan, memperluas kapasitas kelembagaan, dan merestrukturisasi sistem pengumpulan data dan informasi. Kebijakan publik dapat menjadi alat yang tidak hanya mengatasi masalah, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih egaliter, partisipatif, dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dinamika masyarakat jika didekati secara inklusif, adaptif, dan reflektif..

Daftar Pustaka

- Ariel, N., & Islam, K. G. Y. (2024). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Isu Disabilitas di Indonesia. *SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities*, 1(3), 144-155.
- Bardach, E. (2009). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. CQ Press.
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice Hall.
- Febrianti, N. A., Devi, A. S., Arifah, A. S., Maulidina, N. D., Putri, M. R., Arum, B. M., & Angin, R. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik. *Consilium: Education and Counseling Journal*, 5(1), 85-93.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Subsidi Energi 2021-2022*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.
- Kementerian PAN-RB. (2023). *Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Jakarta: Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana*.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy Review*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Pramusinto, A., & Wicaksono, A. (2021). Evaluasi Evidence-Based Policy pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 120–135.
- Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Yani, Y., & Siregar, R. (2021). Legitimasi Sosial dalam Desain Kebijakan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 56–72.